

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENURUNAN ANGKA STUNTING

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN EFFORTS TO REDUCE STUNTING

Pimpi Fardianti^{1*}, Antik Bintari²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran, Sumedang-Indonesia.

*Korespondensi: Pimpi Fardianti. Email: pimpifardianti2001@gmail.com

(Diterima: 02-07-2024; Ditelaah: 09-07-2024; Disetujui: 24-09-2024)

ABSTRACT

This research is motivated by the high stunting rate in Tasikmalaya Regency in 2022. To reduce the stunting rate, the Tasikmalaya District Government collaborates with pentahelix elements. Therefore, it is important to identify the collaboration process to see the truth of the collaboration. The purpose of the research is to describe the collaboration process to reduce stunting in Tasikmalaya Regency through the dimensions of face-to-face dialogue, trust building, commitment to the process, shared understanding, and intermediate outcomes. This study uses a qualitative method of descriptive presentation. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The technique of determining informants is done by purposive technique with a total of 9 informants. The theory used is the theory of collaborative governance according to Ansell and Gash by using five dimensions of the collaboration process as an analysis knife, namely face-to-face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, and intermediate outcome. The results of the study prove that there is ineffectiveness in the collaboration process such as, communication between the elements involved is not optimal, trust and commitment between the elements involved have not been built equally, there is no shared understanding of the issue of reducing stunting rates, and the stunting rate in Tasikmalaya Regency has not decreased significantly. Based on the five dimensions of the collaborative governance process according to Ansell and Gash, it can be concluded that the things emphasized in the collaboration process have not been fulfilled, this is due to the inconsistency of policies regarding the involvement of collaborative elements, which affects the dimensions of collaborative governance according to Ansell and Gash. In addition, the programs issued by the Tasikmalaya Regency Regional Government in an effort to reduce the stunting rate are not sustainable so that they have not been able to reduce the stunting rate significantly.

Keywords: Collaborative Governance, Stunting, Regional Government, Tasikmalaya Regency.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan tingginya angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022. Dalam upaya penurunan angka stunting tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berkolaborasi dengan unsur pentahelix. Oleh sebab itu, penting untuk mengidentifikasi proses kolaborasi supaya dapat melihat kebenaran dari kolaborasi tersebut. Tujuan penelitian mendeskripsikan proses kolaborasi dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya melalui dimensi *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome*. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif penyajian bersifat deskriptif. Teknik Pengumpulan data melalui obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive* dengan jumlah informan sebanyak 9 informan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash dengan menggunakan lima dimensi proses kolaborasi sebagai pisau analisis, yaitu *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome*. Hasil penelitian membuktikan adanya ketidakefektifan dalam proses kolaborasi seperti, komunikasi antar unsur yang terlibat belum optimal, kepercayaan dan komitmen antar unsur yang terlibat belum terbangun secara merata, belum adanya pemahaman bersama mengenai isu penurunan angka stunting, serta angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya belum turun secara signifikan. Berdasarkan lima dimensi proses kolaborasi *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang ditekankan dalam proses kolaborasi tersebut belum terpenuhi, hal tersebut diakibatkan karena adanya inkonsistensi kebijakan mengenai pelibatan unsur kolaborasi sehingga berpengaruh terhadap tidak terpenuhinya dimensi *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash. Selain itu, program-program yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam upaya untuk menurunkan angka stunting bersifat tidak berkelanjutan sehingga belum mampu menurunkan angka stunting secara signifikan.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Kabupaten Tasikmalaya, Pemerintah Daerah, Stunting.*

Fardianti, P., & Bintari, A. (2024). Collaborative Governance Dalam Upaya Penurunan Angka Stunting. *Jurnal Governansi*, 10(2): 201-212.

PENDAHULUAN

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat malnutrisi berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Mengakibatkan anak lebih kecil dari anak normal pada usia yang sama dan mengalami keterlambatan berpikir. Sejak janin dalam kandungan, yakni 1.000 Hari Pertama Kelahiran (Gustri, 2023). Penyebab lainnya yaitu pola asuh, status kesehatan anak, status sosial ekonomi, serta pengaruh lingkungan (Alderman et al., 2019). Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*), Indonesia ialah negara ketiga yang memiliki angka Stunting tertinggi di regional Asia Tenggara. Lebih lanjut, Indonesia juga masuk kedalam peringkat lima besar negara dengan angka Stunting tertinggi di dunia bersama dengan Pakistan (45%), Congo (43%), India (39%) dan Ethiopia (38%) (Georhegan, 2017).

Berdasarkan data dari opendata.jabarprov.go.id tahun 2022 Kabupaten Tasikmalaya menduduki posisi keempat jumlah balita Stunting terbanyak yaitu 14.122 balita penyintas Stunting. Kemudian, menurut data BPB (Badan Penimbangan Balita) Kabupaten Tasikmalaya terdapat 8 Kecamatan yang memiliki prevalensi diatas 20% di tahun 2022 diantaranya: Cigalontang 29,9%, Bojongasih 28,6%, Taraju 25,1%, Salopa 23,8%, Sukahening 21,8%, Bojonggambir 20,6%, Cisayong 20,5%, dan Sukarame 20,2%.

Mengingat terdapat keterbatasan fungsi dan peran pemerintah dalam menangani permasalahan tingginya angka Stunting di Kabupaten Tasikmalaya maka diperlukan adanya kolaborasi dari berbagai unsur untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting. Sebagaimana tercantum dalam pasal 16 ayat (3) dijelaskan bahwa dalam menjalankan

wewenang tersebut dinas dibantu oleh tim koordinasi yang mana tim koordinasi tersebut terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pelaku usaha. Lebih lanjut, tim koordinasi tersebut dalam menjalankan tugas dan perannya mengacu pada Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28.Dinsos.PPKB.P3A./2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka stunting, salah satunya yaitu melakukan kolaborasi bersama unsur-unsur lain (Muafa, et al., 2024; Pratidina, et al., 2023).

Namun, dalam proses kolaborasi tersebut masih terdapat beberapa kendala seperti komunikasi antar unsur yang terlibat belum optimal yang mengakibatkan tidak terintegrasinya komunikasi diantara masing-masing unsur, kepercayaan dan komitmen antar unsur yang terlibat belum terbangun secara merata sehingga berpengaruh terhadap hasil kolaborasi yang dilakukan karena belum terbangunnya kepercayaan serta komitmen diantara unsur-unsur yang terlibat, belum adanya pemahaman bersama antar unsur yang terlibat dalam proses kolaborasi dalam upaya penurunan angka stunting karena mindset unsur yang terlibat hanya sekedar menjalankan tugas tidak menganggap permasalahan stunting adalah hal yang harus diatasi bersama, terakhir hasil akhir dari proses kolaborasi dalam upaya penurunan angka stunting tahun 2022-2023 di Kabupaten Tasikmalaya belum turun secara signifikan.

Adapun penelitian yang relevan yang digunakan sebagai acuan dan referensi, yaitu penelitian Sukanti dan Faidati (2021) tentang *Collaborative Governance* dalam Upaya Penanggulangan Stunting di Kabupaten Sleman menunjukkan bahwa implementasi *Collaborative Governance* secara

keseluruhan cukup baik. Meskipun beberapa indikator ditemukan belum memadai seperti kurangnya platform komunikasi dalam pemerintahan kabupaten dan masih kurangnya keterlibatan sektor swasta.

Selanjutnya, penelitian Fatikha dan Permata sari (2023) tentang *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting hasil penelitian menunjukkan berbagai kementerian dan lembaga terlibat dalam kerja sama tersebut, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, BKKBN, dan BPOM. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan kerja sama antar lembaga berhasil, namun perlu dikembangkan lebih lanjut. Terdapat perbedaan yang mana peneliti menggunakan teori *Collaborative Governance* ansell dan gash yang terdiri dari dimensi *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, dan intermediate outcome*. (Ansell & Gash, 2008) Sedangkan, kedua penelitian tersebut menggunakan teori Emerson dan Nabatchi diantaranya keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama (Emerson et al., 2012).

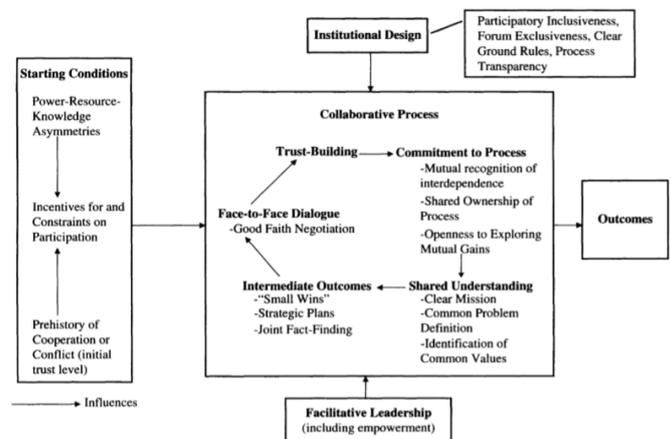
Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan proses kolaborasi dengan dimensi *face to face dialogue, trust building, commitment to process, shared understanding, serta intermediate outcome* dalam upaya penurunan angka stunting Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023. Penelitian ini dapat menjadi informasi terbaru bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait *Collaborative Governance* dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023.

MATERI DAN METODE

Untuk mengkaji dan mendeskripsikan isu-isu yang dijumpai oleh peneliti, teori yang relevan digunakan seperti berikut:

Model Collaborative Governance

Menurut (Ansell & Gash, 2008) *Collaborative Governance* mencakup lima elemen kunci diantaranya kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaboratif, dan hasil. Inti dari konsep ini adalah proses kolaboratif, yang sangat penting dan mendasar. Kemudian, komunikasi merupakan inti dari kolaborasi, sehingga proses kolaboratif ini dimulai dengan *face-to-face dialogue*.



Gambar 1. Model of Collaborative Governance

1. *Starting Condition*, kondisi dimana proses *Collaborative Governance* dilaksanakan dan dimotivasi oleh visi bersama tentang apa yang akan dicapai serta keuntungan yang diperoleh dari proses tersebut.
2. *Facilitative Leadership*, kepemimpinan adalah sebuah fasilitator yang berperan membawa unsur yang terlibat dalam proses kolaborasi. Kepemimpinan berperan penting untuk dapat merangkul, memberdayakan unsur lemah agar menyesuaikan, serta menyertakan semua unsur yang dilibatkan agar proses kolaborasi dapat berjalan sesuai keinginan.
3. *Institutional Design*, mengacu pada bagaimana forum kolaborasi dirancang, partisipasi, dan kehadiran seluruh unsur di dalamnya, acuan dasar yang jelas, dan keterbukaan prosesnya.

4. *Collaborative Process*, proses kolaborasi ini menggambarkan tahapan yang akan dilalui oleh semua elemen yang terlibat. Proses kolaboratif mempunyai beberapa dimensi:
- a) *Face to face dialogue*, Proses kolaboratif tercipta melalui dialog tatap muka dengan seluruh unsur yang terlibat. Dialog ini penting untuk mengidentifikasi peluang dan manfaat bagi kelompok. Hal tersebut adalah karakteristik tata kelola kolaboratif yang berorientasi pada konsensus.
 - b) *Trust building*, proses kolaboratif mengharuskan adanya bangunan kepercayaan di antara unsur-unsur yang terlibat. Untuk itu, kurangnya kepercayaan menjadi perhatian utama di dalam *Collaborative Governance* karena hasil yang kolaboratif dapat memakan banyak waktu dan komitmen jangka panjang. Membangun kepercayaan adalah langkah berkelanjutan dari dialog serta kompromi terkait isu-isu substantif.
 - c) *Commitment to process*, salah satu unsur penting menentukan kesuksesan sebuah kolaborasi yaitu tingkat komitmen anggotanya (Ansell & Gash, 2008) Komitmen mempunyai kaitan yang kuat dengan motivasi anggota untuk berkontribusi dalam kolaborasi. Keputusan para *Stakeholders* Partisipasi ini didasari oleh keinginan meyakinkan bahwa suara serta pendapat mereka tidak dihiraukan, Berpartisipasi dalam proses ini berarti menerapkan keyakinan bahwa kebijakan yang diinginkan merupakan hasil keterkaitan dengan tingkat saling bergantung yang tinggi di antara unsur-unsurnya. Komitmen untuk berkolaborasi membutuhkan hadirnya perubahan dalam psikologis *Stakeholders*, yakni adanya rasa saling memberikan validasi atau apresiasi.
 - d) *Shared understanding*, Proses kolaboratif mengharuskan unsur yang terlibat memiliki pemahaman yang sama untuk mencapai tujuan proses. Artinya, unsur yang terlibat dalam proses tersebut sepakat mengenai apa yang dapat mereka capai bersama. Dalam hal ini pemahaman bersama dalam *Collaborative Governance* dapat diartikan sebagai visi, tujuan, ideologi, Kejelasan arah dan strategi, kesepakatan mengenai nilai-nilai bersama, kesepakatan mengenai penafsiran suatu masalah, atau kesepakatan mengenai pengetahuan yang tepat untuk memecahkan suatu masalah.
 - e) *Intermediate outcomes*, Pada proses kolaborasi tentunya terdapat output yang menjadi hasil dari suatu proses untuk mencapai tujuan dan manfaat kolaborasi. Kolaborasi cenderung terjadi ketika tujuan dan keuntungannya lebih konkret.

Penta Helix

Konsep pentahelix merupakan konsep yang berkembang atas perkembangan konsep quadruple helix (Habibah, 2021). Mudah-mudahan, model pentahelix dapat diingat dengan inisial ABCGM, yaitu *Academian, Business, Community, Government, dan Media*. Jahid melalui jurnal berjudul *Kerjasama Model Pentahelix dalam menanggulangi bencana wabah COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro* menjelaskan bahwa konsep pentahelix diawali dengan adanya ide kolaborasi dengan model triple helix yang dikenalkan melalui teori Etzkowits dan Leydesdorff di tahun 2000. (Pradana, 2021)

Menurut Soemaryani dalam Syaharbanu dalam (Ardiansyah & Pradana, 2021) unsur-unsur yang ada pada model pentahelix mempunyai tugas sesuai dengan kemampuannya. Tiap peran yang dipegang oleh unsur dapat dilihat pada penjabaran melalui poin-poin seperti, a). Pemerintah, Pemerintah merupakan unsur yang

mempunyai peran sebagai regulator, koordinator, dan kontroller pada suatu kegiatan. Melalui peran ini, kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pada suatu kegiatan mencakup dari tahap perencanaan hingga kebijakan publik. Selain itu, menurut Clarke (Adawiyah et al., 2022), pemerintah mempunyai otoritas untuk menyampaikan, memperoleh kesepakatan (konsensus), mengendalikan konflik, menentukan aturan/regulasi, serta mengikutsertakan otoritas dan sumber daya untuk kegiatan bersama. b) Pebisnis, dunia usaha atau pebisnis mempunyai peran untuk dapat menjadi penunjang dalam bentuk infrastruktur dan mengembangkan sumber daya manusia sebagai promotor untuk dapat membantu menunjang anggaran yang disediakan pemerintah. c) Akademisi, Akademisi memegang peran sebagai konseptor. Dalam hal ini, salah satu tugas yang dijalankan oleh akademisi sebagai konseptor adalah sebagai perumus standar kebijakan ataupun program yang akan dijalankan. Disamping itu, akademisi menjadi pusat dari pengetahuan dan teori yang sesuai dengan kebijakan yang akan dibuat agar dapat berjalan dengan optimal. d) Masyarakat/Komunitas, Masyarakat atau komunitas pada model penta helix mempunyai peran sebagai akselerator. Masyarakat atau komunitas menjadi unsur yang penting dalam berlangsungnya sebuah kegiatan karena adanya kesamaan minat. Selain itu, masyarakat atau komunitas juga berperan langsung sebagai narahubung diantara para unsur yang mempunyai kepentingan dan yang berkaitan satu sama lain. e) Media, peran yang mendukung perluasan informasi dalam model pentahelix dipegang oleh media. Dengan kata lain, media mempunyai peran sebagai publikator untuk menyebarkan informasi terhadap program atau regulasi yang sedang berjalan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan penelitian berdasarkan dengan jangka

waktu tertentu dan mengamati serta mengobservasi berlangsungnya kolaborasi. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif adalah suatu cara penelitian untuk dapat mempelajari fenomena yang ada di dalam kehidupan sosial serta masalah individu dengan berlandaskan pada pembuatan gambar secara keseluruhan yang dibuat dengan padanan kata, menyampaikan pendapat dari informan dengan detail, serta digabungkan pada sebuah tulisan ilmiah (Pattilima, 2013).

Untuk memperoleh informasi dan fakta yang lengkap peneliti menggunakan teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Studi lapangan, Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan serta memilih data yang diperoleh di tempat penelitian. Studi lapangan dilakukan menggunakan teknik berikut:
 - a) Observasi, (Creswell, 2010) menjelaskan bahwa Observasi kualitatif dijelaskan sebagai observasi yang mana peneliti turun langsung mendatangi lokasi dan mengamati tingkah laku serta kegiatan yang dilakukan oleh individu yang ada di lokasi penelitian tersebut. Observasi merupakan metode pendukung yang dilakukan dengan mengamati keadaan di lingkungan penelitian.
 - b) Wawancara, Wawancara yang dimaksud yaitu wawancara kualitatif yang mempunyai definisi bahwa sang peneliti mempunyai kebebasan atau keleluasaan untuk dapat bertanya kepada informan tanpa adanya ikatan terhadap urutan atas pertanyaan tersebut (Pattilima, 2013)
 - c) Dokumentasi, merupakan alat yang membantu peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan membaca ringkasan konferensi, surat pengumuman, pernyataan tertulis tentang kebijakan tertentu, buku, peraturan hukum, dan lain-lain. contoh hasil penelitian, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan *Collaborative Governance*.

Dalam mengidentifikasi informan, peneliti menggunakan metode *purposive*. Menurut Sugiyono, *purposive* merupakan suatu metode pengumpulan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan khusus ini penting bagi peneliti untuk memahami subjek penelitian dengan berasumsi, misalnya, bahwa orang tersebut paling tahu apa yang kita harapkan/mungkin orang tersebut memegang kendali (Sugiyono, 2013). Berikut paparan informan penelitian:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Kategori	Jabatan	Teknik pengumpulan Data
1.	Informan Kunci	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Sosial PPKBP3A	<i>Purposive</i>
2.	Informan kunci	Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan	<i>Purposive</i>
3.	Informan kunci	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPR	<i>Purposive</i>
4.	Informan kunci	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda	<i>Purposive</i>
5.	Informan kunci	Anggota Komisi IV DPRD	<i>Purposive</i>

6.	Informan kunci	Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat STIKes Respati Tasikmalaya	<i>Purposive</i>
7.	Informan kunci	Redaktur Pelaksana Radar Tasikmalaya,	<i>Purposive</i>
8.	Informan kunci	Ketua 'Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya	<i>Purposive</i>
9.	Informan Kunci	Nutrisionis PT. Indofood Kabupaten Tasikmalaya.	<i>Purposive</i>

Sumber: Diolah peneliti, 2024

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis mengenai *Collaborative Governance* dalam Upaya Penurunan Angka Stunting Di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022-2023 menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

Dimensi *face to face dialogue*

Dimensi *face to face dialogue* pada model Ansell dan Gash mempunyai makna sebagai langkah awal dalam melakukan kolaborasi yang dimulai dengan berkomunikasi sebagai upaya untuk mencapai sebuah konsensus. Dalam kolaborasi pentahelix ini diikat dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28.Dinsos.PPKB.P3A./2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagai salah satu syarat dari berjalannya kolaborasi, yaitu perjanjian kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Anggota-anggota yang dilibatkan dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting ini tentunya mengedepankan kepakaran individu ataupun kepraktisan individu kecondongan pada sebuah isu, yaitu stunting.

Selain bertemu dan berinteraksi dalam kegiatan rembuk stunting, setiap per triwulan juga terdapat rapat koordinasi yang dilaksanakan secara luring yang bertempat di Aula Wiradadaha Bapelitbangda Kabupaten Tasikmalaya untuk membahas tentang progres maupun evaluasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tiap unsur dalam upaya menurunkan angka stunting tahun 2022. Pembahasan dalam pertemuan tersebut dilakukan secara bergantian guna menyampaikan progres serta evaluasi dari tiap unsur yang terlibat dalam upaya penurunan angka stunting.

Dalam kegiatan rembuk stunting maupun rapat koordinasi yang diselenggarakan, setiap anggota Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk menyampaikan hal yang ingin dicapainya. Namun, hal tersebut berbeda dengan unsur dunia usaha dan media massa sebagai dua unsur yang tidak dilibatkan secara penuh dalam proses kolaborasi. Lebih lanjut, hal tersebut diakibatkan karena adanya inkonsistensi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Hal tersebut dapat dilihat melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting, sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Ayat (3) dijelaskan bahwa dalam menjalankan wewenang dinas dibantu oleh tim koordinasi yang mana tim koordinasi tersebut terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pelaku Usaha. Lebih lanjut, Bupati Tasikmalaya mengeluarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28.Dinsos.PPKB.P3A/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting, dalam Keputusan tersebut dicantumkan terkait unsur yang dilibatkan beserta dengan tugas dan perannya tiap. Namun, dalam Keputusan tersebut terdapat perbedaan

dengan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 Pasal 16 Ayat (3) yang mana dalam Keputusan tersebut tidak tercantum pelibatan kolaborasi dengan unsur media massa dan pelaku usaha. Sehingga, hal tersebut menyebabkan perwakilan media massa dan pelaku usaha tidak perlu memberikan kontribusi lebih lanjut dalam proses kolaborasi karena tidak adanya juknis dan juklak berikutnya. Selain itu, inkonsistensi kebijakan tersebut juga menyebabkan kolaborasi dengan unsur media massa dan dunia usaha tidak optimal yang berpengaruh terhadap output yang sudah ditetapkan.

Dimensi *trust building*

Hal yang ditekankan pada *dimensi trust building* yaitu kepercayaan yang terbangun dari tiap unsur melalui fungsi atau peran yang dimiliki. Dengan segala kelebihan, kepentingan, peran atau fungsi yang dimiliki inilah nantinya akan menumbuhkan kolaborasi yang baik sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh tiap unsur. Pada dimensi ini, komunikasi menjadi modal utama untuk menumbuhkan rasa percaya satu sama lain pada setiap unsur yang berkolaborasi.

Dalam kolaborasi ini, hampir semua pihak menyatakan bahwa mereka yakin dan percaya bahwa dengan adanya kolaborasi ini upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya dapat lebih memudahkan dalam penanganannya serta membawa perubahan ke arah yang positif terutama dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya.

Tak hanya itu, setiap unsur yang berkolaborasi juga mempunyai peran dan fungsinya tiap untuk dapat memberikan kepercayaan kepada unsur lainnya. Melalui peran dan fungsi yang jelas inilah, setiap unsur ditempatkan sesuai dengan kapasitas dan keahliannya untuk dapat bekerjasama dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Namun, dalam dimensi *trust building* mempunyai

hambatan yang dapat mengakibatkan dimensi ini belum mampu berjalan dengan optimal. Hambatan tersebut yaitu belum meratanya rasa percaya diantara unsur pentahelix yang terlibat. Namun disamping hambatan tersebut, hal yang menjadi kelebihan atas dimensi ini adalah dimana setiap unsur mencoba tetap menaruh rasa percayanya yang tinggi terhadap kolaborasi yang berjalan guna untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Tak hanya itu dalam hal ini semua unsur mempunyai kelebihan dan kepakarannya tiap dengan kata lain unsur yang dilibatkan bukan dipilih secara asal melainkan didasarkan pada kepakaran yang dibutuhkan untuk menunjang berjalannya kolaborasi dalam penurunan angka stunting.

Dimensi *commitment to the process*

Dalam dimensi *commitment to process* menekankan pada ketergantungan dan transparansi yang dimiliki oleh berbagai unsur dalam upaya memperluas jangkauan dan memperluas wawasannya. Hal ini dilakukan untuk dapat mendukung berjalannya kolaborasi secara maksimal dan memberikan dampak yang cukup signifikan dengan melihat rasa tanggung jawab yang dimiliki dalam setiap proses yang disetujui secara bersama (Wahyudin, et al., 2023a).

Dalam hal ini, mengingat angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 cukup tinggi maka melalui Dinas Sosial PPKBP3A Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan komitmennya dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28.Dinsos.PPKB.P3A./2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Dengan adanya keputusan tersebut maka terbentuklah sebuah kolaborasi yang mana dalam tim tersebut melibatkan berbagai unsur seperti OPD lintas sektor, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pelaku usaha. Dalam kurun waktu satu tahun tim percepatan penurunan angka stunting ini

menyelenggarakan sebuah pertemuan rutin yaitu satu kali melaksanakan kegiatan rembuk stunting dan empat kali kegiatan rapat koordinasi. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan dan memperluas wawasan mengenai upaya penurunan angka stunting. Sehingga mendorong untuk timbulnya diskusi dan wawasan yang dilakukan secara terbuka dapat semakin mendukung berjalannya kolaborasi dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Dalam pertemuan ini juga mendukung untuk dapat mengidentifikasi hal-hal yang dapat diolah secara bersama serta peran yang akan diambil oleh setiap unsur-unsur yang terlibat.

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pada dimensi *commitment to process*, komitmen yang terjadi diantara tiap unsur dalam upaya penurunan angka stunting belum terjadi secara merata. Dalam hal ini, komitmen diantara unsur akademisi, komunitas, media massa, dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah terbangun cukup baik. Namun, berbeda dengan unsur dunia yang tidak berusaha membangun komitmen dalam kolaborasi ini karena tidak dilibatkan secara utuh dalam proses kolaborasinya. Disisi lain, unsur media massa sebagai unsur yang tidak dilibatkan secara utuh juga dalam proses kolaborasi namun masih tetap memberikan kontribusinya yaitu menjalankan pemberitaan terkait stunting di Kabupaten Tasikmalaya untuk diketahui oleh masyarakat secara luas serta sebagai bentuk dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk lebih serius dalam menangani permasalahan stunting tersebut. Lebih lanjut, dalam hal ini komitmen yang diberikan oleh unsur pemerintah rata-rata hanya sebatas menjalankan tugas saja belum sampai pada bahwa permasalahan stunting ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan secara bersama sehingga minim untuk adanya pengembangan fungsi

maupun peran karena terpaku pada peran maupun fungsi yang sudah ditetapkan saja.

Dimensi *shared understanding*

Selanjutnya, pada dimensi *shared understanding* hal yang ditekankan yaitu mengenai bagaimana setiap unsur dapat berbagi pandangan atas apa yang ingin dicapai, masalah apa yang akan diselesaikan, dan menelaah aturan yang ada pada proses kolaborasi. Tiga hal tersebut mempunyai kaitan yang erat dengan rasa tanggung jawab yang ditekankan pada dimensi sebelumnya, yaitu dimensi *commitment to process* (Wahyudin, et al., 2023b).

Dalam kolaborasi ini, rata-rata setiap unsur menyatakan bahwa mereka paham terhadap apa yang ingin dicapai dalam kolaborasi tersebut yaitu sebagai upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Selain, memahami hal yang ingin dicapai unsur-unsur yang terlibat pun sudah cukup memahami tentang mengenai apa itu stunting.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa rata-rata unsur yang terlibat dalam kolaborasi ini paham mengenai hal yang ingin dicapai dalam proses kolaborasi tersebut serta mempunyai pemahaman yang cukup baik terkait stunting meskipun dalam realisasinya pemahaman tersebut belum terjadi secara merata diantara unsur-unsur yang terlibat. Selanjutnya, dalam proses kolaborasi tentunya diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesamaan jalan pikir untuk dapat mencapai tujuan bersama. Dengan banyaknya unsur yang dilibatkan dengan berbagai cara pandang dan berpikir yang berbeda tentunya dapat mengakibatkan perbedaan pandangan diantara unsur-unsur yang terlibat. Tetapi dalam proses kolaborasi penurunan angka stunting, hal tersebut bukan merupakan hambatan yang besar. Karena perbedaan pandangan yang terjadi bisa teratasi dengan cara berdiskusi bersama untuk memecahkan suatu permasalahan.

Dimensi *intermediate outcome*

Kemudian pada dimensi terakhir, yaitu dimensi *intermediate outcome* yang mengedepankan hasil akhir dari kolaborasi yang telah dijalankan. Dalam melihat hasil akhir dari kolaborasi, ada berbagai hal yang bisa dijadikan acuan, yaitu proses mencapai tujuan di awal, pembuatan agenda yang taktis, dan mendapatkan fakta secara bersamaan. Namun tak hanya itu, hasil akhir dalam kolaborasi juga dapat dilihat melalui proses kolaborasi yang berjalan sejak awal (Rahmawati, et al., 2024).

Dalam proses *Collaborative Governance*, diupayakan untuk mengukur sebuah keberhasilan atau yang biasa dikenal dengan *outcome*. Dalam proses kolaborasi tersebut, diketahui bahwa komunikasi serta koordinasi antara unsur pemerintah, akademisi, dan komunitas sudah berjalan dengan baik karena mereka terikat dengan adanya Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28.Dinsos.PPKB.P3A./2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Berbeda dengan perwakilan dari unsur media massa dan dunia usaha sebagai unsur yang tidak dilibatkan secara utuh dalam proses kolaborasi ini, sehingga dalam menjalankan perannya tidak diiringi dengan bangunan kepercayaan antar unsur serta komitmen yang kuat dan terkesan berjalan secara sendiri-sendiri.

Selain itu, disimpulkan bahwa hasil akhir dari proses *Collaborative Governance* dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022-2023 belum maksimal karena dari fungsi maupun peran yang dilaksanakan oleh tiap unsur belum menunjukkan hasil yang signifikan. Berlandaskan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya sebesar 27,5% kemudian tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 22,4% artinya dari hasil kolaborasi yang dilaksanakan selama satu tahun tersebut berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,1%. Namun bila mengacu

pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 5 Ayat (1) menjelaskan pada tahun 2024 guna mencapai target nasional angka yang harus dicapai yaitu sebesar 14% artinya Kabupaten Tasikmalaya untuk mencapai target tersebut harus bekerja lebih keras lagi dan melakukan evaluasi pada kegiatan kolaborasi yang telah dilaksanakan serta peningkatan kapasitas unsur-unsur kolaborasi untuk mencapai target tersebut yang mana harus menurunkan angka stunting sebesar 8,4% dalam kurun waktu satu tahun yaitu dari tahun 2023-2024.

Selain itu, dalam proses kolaborasi tentunya tidak selamanya berjalan mulus melainkan terdapat beberapa hambatan seperti, adanya ego sektoral, minimnya anggaran, program-program yang dilaksanakan rata-rata belum menyentuh permasalahan stunting secara langsung dan tidak berkelanjutan. Selain itu, adapun hambatan lain yang menghambat suksesnya proses kolaborasi ini yaitu karena pihak pemerintah tidak memberikan porsi yang sama bagi unsur dunia usaha dan unsur media massa karena tidak melibatkan kedua unsur tersebut secara utuh dalam proses kolaborasi ini. Sehingga, mempengaruhi terhadap komitmen serta kontribusi yang diberikan dan kolaborasi pentahelix disini tidak berjalan maksimal karena tidak adanya interaksi unsur dunia usaha dan unsur media massa dengan unsur lainnya serta belum adanya kontribusi yang signifikan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa selama menjalankan proses kolaborasi dengan menerapkan kolaborasi model pentahelix belum berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari komunikasi media massa dan dunia usaha dengan pemangku kepentingan Pentahelix lainnya, karena terbatasnya peran media massa dan dunia usaha akibat tidak konsistennya kebijakan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, semua unsur belum mampu membangun kepercayaan untuk berkolaborasi satu sama lain, hal ini dibuktikan dengan unsur media massa dan dunia usaha yang belum memiliki kepercayaan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mampu menjalankan kolaborasi pentahelix untuk penurunan angka stunting. Hal ini juga disebabkan oleh inkonsistensi kebijakan mengenai pelibatan unsur media massa dan dunia usaha, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap kedua unsur tersebut. Lebih lanjut, belum semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk melaksanakan kolaborasi penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini terlihat pada unsur pemerintah yang rata-rata tugasnya hanya melaksanakan tugas yang berkaitan dengan SK TPPS.

Oleh karena itu, hal ini menghambat pengembangan peran dan solusi yang akan diterapkan. Selanjutnya, seluruh unsur telah memahami apa yang ingin dicapai dalam berlangsungnya kolaborasi. Namun, di sisi lain pemahaman unsur-unsur yang terlibat mengenai stunting belum merata yang mana belum memiliki pemahaman seperti unsur yang berkecimpung dalam bidang kesehatan. Terakhir, proses *Collaborative Governance* dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022-2023 belum maksimal. Hal ini terlihat dari hasil kolaborasi kurang lebih selama satu tahun yang mampu menurunkan angka stunting sebesar 5,1% yang mana dalam prosesnya terdapat beberapa kendala seperti ego sektoral, kurangnya dana, dan sebagian besar program yang dilaksanakan tidak secara langsung mengatasi masalah stunting dan tidak berkelanjutan.

Dari penelitian yang ditemukan di lapangan, peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam upaya penurunan angka stunting Di Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

1. Perlu adanya sinkronisasi pada kebijakan yang ada terkait pelibatan unsur kolaborasi. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kebijakan terkait peran unsur dalam penanganan stunting.
2. Untuk setiap unsur yang terlibat dalam proses kolaborasi, harus ditetapkan target penurunan angka stunting yang didasarkan pada tupoksi masing-masing.
3. Pengalokasian anggaran lebih diprioritaskan untuk kegiatan yang langsung menangani stunting seperti sosialisasi, edukasi dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
4. Pentingnya keberadaan MoU dengan unsur media massa dan unsur dunia usaha agar kedua unsur tersebut dapat memberikan kontribusi yang jelas dalam proses kolaborasi serta agar kolaborasi berjalan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, V. R., Yayuk, A., & Rahayu, S. (2022). Analisis Aktor dan Faktor Kondisi Awal Yang Mempengaruhi *Collaborative Governance* Program Beli Kreatif Lokal Jabodetabek. *Jurnal MODERAT*, 8(4), 818. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Alderman, H., Nguyen, P. H., & Menon, P. (2019). Progress in reducing child mortality and stunting in India: An application of the Lives Saved Tool. *Health Policy and Planning*, 34(9), 667–675. <https://doi.org/10.1093/heapol/czz088>
- Ardiansyah, F., & Pradana, G. W. (2021). *Kolaborasi Model Pentahelix dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah COVID-19 Di Kabupaten Bojonegoro*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42842/36791>
- Bupati Tasikmalaya. (2018). Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Penurunan Stunting. Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Singaparna: Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Bupati Tasikmalaya. (2022). Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 445/Kep.28.Dinsos.PPKB.P3A./2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Bupati Tasikmalaya. Singaparna: Bupati Tasikmalaya.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Dinas Kesehatan. (2022). Persentase Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/datase/t/persentase-balita-stunting-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat/>
- Dishubkominfo Kabupaten Tasikmalaya. (2022). “Gambaran Status Gizi Balita Hasil BPB Agustus 2022” <https://www.tasikmalayakab.go.id/index.php/en/cari/send/0-/672-publikasi-data-stunting-kab-tasikmalaya-2022>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for *Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2023). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING COLLABORATIVE GOVERNANCE IN HANDLING STUNTING*. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 14, Issue 3). <https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>
- Georhegan, T. (2017). Stolen Childhoods (End of Chilhoods Report 2017). *Save the Children Federation*, 30–34. <https://www.savethechildren.org/content/dam/usa/reports/advocacy/us->

- complement-to-end-of-childhood-report-2017.pdf
- Gustri Putri, S. (2023, May 24). *Stunting dan Pencegahannya*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Habibah, E. N. (2021). *Collaborative Governance: Konsep & Praktik dalam Pengelolaan Bank Sampah*. Pustaka Rumah Cinta.
- Muafa, M. A., Wahyudin, C., Salbiah, E., & Subagdja, O. (2024). Efektivitas Program Pemberian Makanan Tambahan Pada Anak Stunting. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4947-4953.
- Pattilima, H. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Pradana, G. W. (2021). Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Upaya Penanganan Bencana Wabah COVID-19 Di Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 9(4), 547.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/42842/36791>
- Pratidina, G., Wahyudin, C., Rahmawati, R., Zakiah, R. U., Handayani, Y., & Putri, R. N. A. (2023, December). Implementation of the Accelerated Stunting Handling Program. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 20-28).
- Rahmawati, R., Ramdani, F. T., Wahyudin, C., Apriliyani, N. V., Purnamasari, I., & Subagdja, O. (2024). Kolaborasi Antar Instansi Bappeda Litbang dengan Sekretariat Daerah dalam Meningkatkan Akuntabilitas. *Karimah Tauhid*, 3(8).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Alfabeta.
- Sukanti, & Faidati, N. (2021). *Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Caraka Prabhu*, 5(1), 91.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-caraka-prabhu/article/view/418/231>
- Wahyudin, C., Subagdja, O., & Iskandar, A. (2023). Desain Model Collaborative Governance Dalam Penanganan Pengurangan Penggunaan Plastik. *Jurnal Governansi*, 9(2), 151-162.
- Wahyudin, C. E. C. E. P., Apriliani, A. F. M. I., Ramdani, F. T., Pratidina, G. I. N. U. N. G., & Seran, G. G. (2023). a Bibliometric Analysis Collaborative Governance of Plastic Reduction Through the Transformation Industry. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(4), 85-93.